

BAB IV

DINAMISASI PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD)

A. PRD terkait Kerusuhan 27 Juli 1996

PRD yang lahir dari proses panjang aktivitas mahasiswa era 1990-an, telah melahirkan pola, format dan paradigma baru bagi perkembangan gerakan mahasiswa dalam rangka meruntuhkan pemerintahan Orde Baru. Dalam eksistensinya memimpin perjuangan untuk meruntuhkan kekuasaan Orde Baru, PRD juga merumuskan tuntutan-tuntutan mendesak yang salah satunya adalah isu-isu perburuhan mengenai persoalan ekonomi. Dalam konteks itu PRD menghubungkan kepentingan ekonomi buruh dengan perjuangan politik menentang otoritarianisme Orde Baru.

Untuk memulai gerakan itu, PRD melakukan agitasi-agitasi yang diantaranya mengenai tingginya harga-harga kebutuhan pokok, rendahnya upah buruh, membongkar kampanye pemerintah yang mengaburkan tiap kontradiksi dalam setiap konflik buruh, membongkar setiap dominasi dan intervensi negara terhadap buruh dalam bentuk SPSI, intervensi militer dalam urusan perburuhan, hak-hak buruh, pencabutan 5 paket UU politik tahun 1985 serta jaminan terhadap kepemilikan tanah bagi penggarap dan juga teknologi yang rendah di bidang pertanian.

Berbagai macam program prioritas/mendesak yang telah digariskan PRD telah dibuktikan oleh para aktivisnya dengan selalu tampil di garda depan dalam barisan oposisi melawan pemerintah Orde Baru. Karena itulah

PRD menjadi sasaran perburuan utama pemerintah dalam kerusuhan 27 Juli 1996. Dengan memukul mundur PRD para penguasa Orde Baru berharap bisa memecah belah kelompok-kelompok oposisi. Namun hal ini ternyata tidak ampuh dan berhasil, karena praktek-praktek represifitas Orde Baru yang terlalu lama dan memunculkan akumulasi kemarahan rakyat yang mendukung gerakan oposisi saat itu.

Rentetan kejadian yang terjadi sepanjang tahun 1996 itu mengindikasikan bahwa gerakan prodemokrasi telah mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Ditambah lagi adanya aliansi yang dibangun massa PRD dengan massa PDI Mega yang menentang intervensi dan represi pemerintah terhadap eksistensi PDI Megawati. Hal itu mencerminkan bahwa rakyat biasa pun memberikan dukungan secara terbuka kepada semua gerakan oposisi ketika berhadapan dengan Orde Baru. Mengenai kronologis yang terjadi sepanjang eksistensi perjuangan PRD tepatnya pada tahun 1996, dimana terjadi Kerusuhan 27 Juli yang merupakan hasil konspirasi pemerintah Orde Baru dalam rangka memukul gerakan oposisi akan dibahas dibawah ini.

1. Hubungan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kehidupan dan dinamika partai politik di Indonesia pada masa Orde Baru selalu mengalami intervensi dan represi dari negara. Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi

bahwa partai politik merupakan bagian dari masyarakat yang keberadaannya selalu dicurigai oleh pemerintah Orde Baru. Sejak diberlakukannya proses fusi secara paksa terhadap partai-partai politik pada tahun 1973, ditambah lagi dengan pemberlakuan fungsi pembinaan politik terhadap partai-partai politik oleh Mendagri serta aparat birokrasi di bawahnya,¹ maka sesungguhnya kedaulatan rakyat dalam menentukan jalannya kehidupan bernegara sudah tidak ada nilainya lagi.

Dalam payung 5 Paket UU Politik tahun 1985, setiap gagasan atau gerakan politik yang bertujuan untuk menciptakan demokratisasi di Indonesia hampir selalu mengabaikan peran partai politik sebagai alat perjuangan yang paling tinggi. Demikian juga sebaliknya, pembicaraan tentang partai politik maupun aktivitas yang dilakukan oleh partai politik itu sendiri hampir tidak pernah dihubungkan dengan perjuangan demokratisasi secara nyata. Dengan demikian, apa yang disebut kegiatan politik oleh partai politik yang ada selama era Orde Baru tidak lebih dari sekedar kegiatan Organisasi Peserta Pemilu (OPP) semata. Sama sekali tidak mencerminkan partai politik yang mempunyai makna sebagai wadah perjuangan rakyat melalui proses demokrasi.²

Semua itu adalah gambaran umum tentang eksistensi partai politik di Indonesia selama pemerintahan Orde Baru. Oleh karena itu, ketika partai politik yang hidup di atas tatanan politik yang sudah diatur sedemikian rupa,

¹ Sebagaimana yang diatur dalam UU tentang Partai Politik dan Golkar tahun 1985, dalam Badan Pembinaan Hukum Negara (BPHN), *kumpulan Undang-undang Hukum dan Politik*, (Jakarta, Tidak diterbitkan), 1985.

² John MacDougall, *Sekitar PRD dan PDI*, dalam apakabar@clark.net (diakses: Juli 2011).

dengan segala batas-batasnya mulai menunjukkan potensi menjadi wadah bagi aspirasi rakyat yang semakin bersikap kritis, mandiri dan mulai berani menentang Orde Baru, maka pada saat itu juga kekuasaan Orde Baru akan bereaksi untuk mempertahankan kekuasaannya.

Hal tersebutlah yang kemudian pada periode 1994 sebagai masa bangkitnya keberanian politik massa dalam menentang hegemoni Orde Baru menimpa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri. PDI Mega yang dalam konstelasi politik nasional selalu memosisikan dirinya sebagai oposisi pemerintah dan Golkar, mengalami kemelut internal sebagai akibat intervensi frontal dari pemerintah. Hal ini dilihat dengan munculnya Kongres PDI “tandingan” versi Fatimah Akhmad di Medan pada tahun 1996 yang menempatkan Soerjadi sebagai ketua umum PDI versi Orde Baru. Dengan begitu, pemerintah dapat dengan leluasa mengontrol keberadaan dan pergerakan PDI. Kemelut internal antar dua faksi di PDI tersebut pada akhirnya saling memperebutkan kantor DPP PDI yang berada di jalan Diponegoro, Jakarta.

Bagi masyarakat pada umumnya, kemelut yang terjadi pada PDI yang sebenarnya adalah sebuah pelecehan dan pengingkaran atas kedaulatan rakyat. Rakyat bukan hanya marah untuk penghinaan yang dilakukan negara terhadap kedaulatannya, namun lebih jauh lagi bahwa rakyat mulai bangkit kesadarannya untuk bergerak dalam upaya memperjuangkan perubahan, dan juga bangkit melawan setiap dominasi yang menindas kedaulatan mereka. Kesadaran inilah yang menyebabkan bahwa bukan hanya Jakarta yang

bergolak dalam menolak campur tangan militer dan penguasa pada kasus PDI, namun beberapa daerah lain di Indonesia juga bergolak mendukung sepenuhnya keberadaan PDI Megawati.

Hal demikian yang menggerakkan pula Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai pelopor gerakan kaum muda-mahasiswa dalam mendukung dan memperjuangkan sepenuhnya demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati. PRD dengan lantang menolak dominasi dan intervensi Negara terhadap segala macam kekuatan sosial politik di Indonesia, khususnya yang dialami oleh DPP PDI di bawah kepemimpinan Megawati Sukarnoputri.

Bagi PRD dan elemen massa yang berafiliasi di dalamnya, disingkirkannya Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI yang sah, jelas dan nyata adalah bentuk dari intervensi penguasa yang ingin tetap mempertahankan status-quo. Ketakutan penguasa terhadap PDI kepemimpinan Megawati yang dianggap sebagai partainya “wong cilik” telah berhasil meraih simpati mayoritas rakyat yang telah tumbuh kesadaran politiknya, ternyata membuat penguasa menjadi paranoid sehingga dengan cara-cara yang tidak mencerminkan kedewasaan politik. Pemerintah lalu mengambil langkah untuk memojokan dan menyingkirkan sosok Megawati untuk keluar dari PDI yang telah membesarkan namanya, yang kemudian digantikan dengan sosok Soerjadi sebagai “ketua boneka” yang dapat dikendalikan dan diatur oleh penguasa.

Berikut adalah pernyataan sikap PRD terhadap kemelut yang terjadi pada PDI megawati ;³

1. Mendukung sikap dan prinsip kemandirian partai yang telah digariskan oleh DPP PDI di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.
2. Menolak segala macam politik intervensi dan pemecahbelahan terhadap setiap kekuasaan sosial politik di Indonesia.

Selain itu, Partai Rakyat Demokratik (PRD) juga menyatakan beberapa tuntutan politik sebagai berikut :⁴

1. Mendukung sepenuh-penuhnya secara politik, kepengurusan DPP PDI di bawah kepemimpinan Megawati Sukarnoputri sesuai hasil Munas Partai 1993, sebagai wujud nyata dari kedaulatan partai politik terhadap kekuasaan negara.
2. Mengecam keras terjadinya praktek-praktek intimidasi dan penekanan yang dilakukan oleh aparat birokrasi sipil maupun militer di beberapa daerah terhadap pengurus DPD dan DPC PDI untuk menyetujui dan menghadiri Kongres PDI versi Fatimah Akhmad.
3. Menyerukan kepada seluruh kekuatan pro-demokrasi di Indonesia untuk tetap konsisten menolak setiap usaha politik intervensi, pemecahbelahan dan rekayasa penguasa dalam urusan internal

³ Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD), *Pernyataan Sikap Partai Rakyat Demokratik: UPAH 7000, TURUNKAN HARGA, PARTAI BARU, PRESIDEN BARU !!!*, dalam prdnews@idola.net.id (diakses: Juli 2011)

⁴ Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD), *Op.cit.*,

organisasi massa maupun organisasi sosial politik, seperti yang ditunjukkan dalam kasus NU dan PDI.

4. Menolak paket 5 UU Politik tahun 1985, yang selama ini menjadi sumber legitimasi politik bagi kekuasaan politik orde baru untuk melakukan intervensi terhadap setiap organisasi massa maupun organisasi sosial politik, sehingga tidak pernah ada kemandirian organisasi.

Sebagai hasil dari pernyataan sikap PRD tersebut, banyak terselenggara aksi-aksi demonstrasi gabungan massa PDI dan PRD sebagai bentuk respons terhadap kemelut yang terjadi dalam tubuh PDI. Tuntutan-tuntutan yang disuarakan dalam berbagai aksi demonstrasi tersebut biasanya seputar; pencabutan paket 5 UU Politik yang merupakan mata rantai kendala kehidupan demokrasi di Indonesia, penghapusan dwifungsi ABRI, dan pencalonan Megawati sebagai presiden RI, menggemakan di pelosok-pelosok daerah yang menjadi basis PDI maupun PRD. Berikut adalah beberapa aksi yang dilakukan PRD yang juga beraliansi dengan warga PDI:⁵

1. Tanggal 14 Juni 1996 di Semarang. Aksi ini merupakan aksi rally turun jalan yang diikuti oleh lebih dari seratus orang perwakilan warga PDI dari seluruh Jawa Tengah (Semarang, Solo, Batang, Pekalongan, Boyolali, dsb) dan anggota PRD Semarang. Aksi rally ini dimulai dari halaman Kampus Fakultas Sastra Undip menuju kantor Kaditsospol di bawah bendera PRD. Sayangnya

⁵ Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD), Perlawanan Terus Menerus PRD untuk PDI, dalam prdnews@idola.net.id (diakses: Juli 2011)

sebanyak 2 truk warga PDI dari Pati dan Batang tidak dapat menghadiri aksi ini karena mereka dicegat oleh aparat dalam perjalanan mereka menuju kota Semarang.

2. Tanggal 17 Juni 1996 di Surabaya. Aksi ini merupakan aksi turun jalan yang diikuti oleh lebih dari seribu orang warga PDI dan anggota PRD Surabaya dibawah bendera BPM (Barisan Pendukung Megawati). Aksi ini mendapat respon yang luas dari masyarakat Surabaya dan aksi ini hampir memacetkan jalan karena membludaknya massa di jalan-jalan protokol.
3. Tanggal 17 Juni 1996 di Yogyakarta. Aksi ini merupakan aksi turun jalan yang diikuti oleh ratusan warga PDI dan anggota dari beberap organisasi massa di Yogya. Salah satu ormas yang terlibat dalam aksi tersebut adalah SMID (Solidartitas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi) cabang Yogyakarta yang merupakan salah satu afiliasi PRD.
4. Tanggal 18 Juni 1996 di Salatiga. Aksi ini merupakan aksi turun jalan yang diikuti ratusan warga PDI dan anggota PRD Jawa Tengah. Aksi ini merupakan aksi terbesar di Salatiga yang mendapat respon demikian luas di kalangan masyarakat Salatiga. Dan bersamaan dengan itu di Jakarta pada hari yang sama terjadi aksi pemogokan buruh di DPR RI yang melibatkan massa buruh dari 2 pabrik di Tangerang dan Bogor (PT. King Stone dan PT. Indo Shoes) berjumlah 4000 orang yang diorganisir oleh PPBI

yang merupakan serikat buruh yang berafiliasi dengan PRD. Aksi ini membawa bendera PRD, dan tuntutan yang diajukan selain tuntutan ekonomis juga tuntutan politik yaitu pencabutan 5 UU Politik tahun 1985, penghapusan dwifungsi ABRI, dan dukungan terhadap Megawati sebagai presiden RI. Massa aksi berhasil menduduki DPR/MPR sampai jam 24.00 wib, karena kemudian massa mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh militer dengan cara militer menyeret massa untuk keluar dari gedung dengan pukulan rotan dan tendangan sepatu lars, dan hingga saat ini beberapa buruh masih menderita cedera yang cukup parah

5. Tanggal 19 Juni 1996 di Jakarta. Aksi dukungan terhadap megawati ini dilakukan dengan aksi rally dari DPP PDI menuju Silang Monas. Aksi ini diikuti oleh 4000 massa dari PDI dan anggota dari beberapa organisasi massa dan PRD juga terlibat didalamnya. Dan bersamaan dengan itu pada hari dan jam yang sama di DPR terjadi lagi aksi buruh di depan kantor DPR/MPR dibawah kepemimpinan PRD. Aksi ini melanjutkan aksi tanggal 18 Juni 1996, dan militer mengantisipasi dengan jalan menutup pagar depan kantor DPR/MPR dan menguncinya dan juga memblokade dengan pasukan anti huru hara sehingga massa yang berjumlah 4000 tersebut memenuhi jalan raya karena tidak bisa masuk. Kemudian massa diarahkan menuju kantor Depnaker

(Departemen Tenaga Kerja). Disini massa mendapat perlakuan tidak simpatik dari militer dan juga Depnaker bahkan ketika aksi selesai pada jam 19.30 wib , 2 anggota PRD diculik oleh militer dimana masing-masing dibawa ke kantor Polisi Daerah Metro Jaya dan ke kantor Polisi Sektor Setia Budi Jakarta Selatan. Disana mereka diinterogasi dan mengalami teror fisik maupun mental.

6. Tanggal 20 Juni 1996 di Jakarta. Aksi ini merupakan aksi terbesar yang dilakukan oleh PDI dengan jumlah massa mencapai kurang lebih 15.000 orang. Aksi PDI ini ber-aliansi dengan kelompok-kelompok pro-demokrasi di Indonesia dan salah satunya adalah PRD. Aksi rally dimulai dari DPP PDI menuju Silang Monas namun baru sampai di depan stasiun Gambir, massa aksi diporakporandakan oleh militer dengan menggunakan pentungan rotan, tendangan sepatu lars, lemparan batu, dan bahkan hantaman panser. Kekerasan militer ini menyebabkan jatuhnya 4 korban nyawa bahkan berita terakhir menyebutkan ada satu lagi warga PDI yang teridentifikasi sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), mayatnya ditemukan di pinggir rel kereta api masih dengan baju seragam PDI merah hitam. Selain korban jiwa lebih dari 70 orang mengalami luka memar dan gegar otak, dan lebih dari 50 orang ditahan militer dan diinterogasi di kantor KOSTRAD dan KOPPASUS.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aliansi yang terbangun antara massa PDI Mega dengan massa PRD merupakan suatu konsolidasi dan kerjasama politik dalam memperjuangkan proses demokratisasi di Indonesia. Dua kubu yang bersinergi tersebut memandang bahwa apa yang telah dilakukan pemerintah terhadap eksistensi PDI Mega merupakan suatu intervensi yang mengarah pada upaya-upaya pengebirian terhadap Hak-hak Azasi Manusia (HAM) dan kedaulatan rakyat.

Proses sinergisasi yang dilakukan oleh kedua kubu ini pada akhirnya dipandang pemerintah Orde Baru sebagai suatu kekuatan yang potensial menggagalkan pemilu 1997 sebagai proses pelanggaran tahta Orde Baru. Maka dengan itu, pemerintah beserta alat-alat represinya bertekad untuk melakukan pembersihan terhadap kekuatan PRD, PDI dan juga gerakan prodemokrasi lainnya dalam suatu konspirasi. Hal tersebut yang kemudian pecahnya kerusuhan 27 Juli di Jl.Diponegoro, Jakarta sebagai upaya pembersihan terhadap rival-rival politik pemerintah Orde Baru.

2. Kerusuhan 27 Juli 1996

Munculnya mimbar bebas di halaman kantor DPP-PDI di Jl. Diponegoro Jakarta, bagi aktivis PRD merupakan suatu kemajuan dinamis dalam prestasi politik rakyat untuk merebut ruang politiknya. Situasi dan kondisi yang tercipta dengan adanya mimbar bebas tersebut mampu membangkitkan kegairahan politik di sejumlah kota. Selain di Jakarta, mimbar bebas juga diadakan di Surabaya yang bertempat di kantor DPP-PDI

Jawa Timur. Mimbar bebas tersebut diikuti oleh massa dari kelompok mahasiswa, buruh dan lain-lain.

Pada saat itu, telah dibangun aliansi pada tingkat mobilisasi massa antara mahasiswa dan buruh yang diorganisir oleh PRD Jawa Timur dengan massa PDI pro Mega. Salah satu bentuknya yaitu ketika PRD Jawa Timur menyelenggarakan aksi gabungan mahasiswa dan buruh pada tanggal 8 Juli 1996. Namun perencanaan aksi yang akan dilakukan sehari-hari tersebut gagal karena pada aksi pertama tanggal 8 Juli terjadi represi besar-besaran yang menyebabkan tertangkapnya Dita Indah Sari (Ketua Umum PPBI), Mohammad Soleh (SMID Surabaya) dan Coen Husein Pontoh (STN).⁶

Keesokan harinya, aksi massa pro Mega tetap berlangsung dengan massa ribuan orang dan para aktivis PRD juga turut andil dalam aksi tersebut. Massa mendatangi Gedung Grahadi, kediaman resmi gubernur Jawa Timur. Aksi represif yang terjadi pada sehari sebelumnya ternyata tidak membuat ciut nyali massa yang selamat dari tindakan represif tersebut.

Hal ini yang rupanya membuat jengkel dan berang Pangdam V Brawijaya yang saat itu dijabat oleh Mayjen Imam Oetomo. Dalam konferensi persnya dia menyebutkan bahwa PRD berada dibelakang aksi buruh tanggal 8 Juli tersebut. Dan mulai saat itu, kampanye yang bersifat menghujat PRD sudah mulai dilakukan oleh pihak ABRI, khususnya Kodam Brawijaya. Akan tetapi kiprah PRD yang membuat jengkel aparat militer tersebut sebenarnya sudah lama dirasakan. Pada tanggal 18 hingga 19 Juni

⁶ FX Rudi Gunawan, *Budiman Sudjatmiko, Menolak Tunduk: Catatan Anak Muda Menentang Tirani*, (Jakarta: Grasindo, 1999), h. 90.

1996 misalnya, Para aktivis PRD melakukan mobilisasi massa buruh sebanyak 4000 orang dengan cara menduduki gedung MPR/DPR RI selama satu malam. Pada saat itu, aksi juga mengalami tindakan represif dan kebanyakan peserta aksi ditangkap.

Dalam konteks mimbar bebas, menurut aktivis PRD, dukungan-dukungan terhadap aksi mimbar bebas tersebut merupakan hanya sebatas dukungan politis saja dan tidak sampai terlibat pada pengorganisasian massa secara teknis. Hal itu diyakini karena mimbar bebas tersebut prosesnya lebih bersifat spontanitas rakyat dalam mengemukakan aspirasi politiknya.⁷

Jadi dalam mimbar bebas di kantor DPP PDI, para aktivis PRD secara murni hanya terlibat sebagai pendukung aksi tersebut. Tapi mungkin karena dalam aksi mimbar bebas di Surabaya, jelas-jelas mereka secara organisasional turut aktif dalam proses mimbar bebas yang digelar di kantor DPP PDI Jawa Timur, maka hal ini yang kemudian dijadikan dasar untuk menuduh keterlibatan PRD dalam mimbar bebas di kantor DPP PDI Jakarta yang kemudian berakhir pada kerusuhan 27 Juli 1996.

Pada tanggal 26 Juli 1996, sebagian aktivis PRD menghadiri diskusi yang diselenggarakan oleh Institut Studi Arus Informasi (ISAI) di Sekolah Tinggi Teologi (STT) di Jl. Proklamasi Jakarta. Diskusi tersebut bertema “Apa yang harus dilakukan Megawati?”, dan menghadirkan Kwik Kian Gie, Matori Abdul Jalil dan Arif Budiman.

⁷ Wawancara dengan I Gusti Anom Astika (Departemen Propaganda PRD periode 1996-1999), pada Juli 2011, di STF Driyarkara, Jakarta.

Di saat yang lain di kantor DPP PDI Jakarta, dibagikan Koran *Angkatan Bersenjata (AB)* secara gratis. Substansi yang dimuat Koran resmi ABRI tersebut menilai bahwa PRD merupakan sebuah organisasi yang berwatak komunis. Selain itu diuraikan pula mengenai aktivitas politik PRD dalam gerakan mahasiswa dan buruh serta keterlibatannya dalam aksi-aksi mobilisasi massa lainnya.⁸

Pada tanggal 27 Juli 1996, tepatnya pada dini hari, sebenarnya mulai ada provokasi dan ketegangan di Jl. Diponegoro. Berikut adalah kronologis yang terjadi sebelum meletusnya peristiwa kerusuhan 27 Juli tersebut;

Sekitar pukul 24.00 WIB bentuk-bentuk provokasi sudah terjadi terhadap massa yang berkumpul di Jl. Diponegoro, Jakarta. Dua orang lalu lalang dengan kendaraan bermotor melaju kencang dan membesarkan gas saat melintas di depan kantor DPP PDI. Lalu sekitar pukul 02.00, datang dua orang tak dikenal memperingatkan massa PDI bahwa akan ada penyerbuan, Satgas PDI lalu menahan mereka dan mengintrogasinya. Mereka ternyata berasal dari sebuah Ormas Pemuda. Kedua orang tersebut akhirnya diamankan oleh Satgas PDI karena kehadiran mereka dianggap membuat resah. Sekitar pukul 03.00, kembali satu dua mobil melaju di depan kantor dengan kecepatan tinggi. Kurang lebih sampai pukul 05.00 belum terjadi apa-apa sehingga wartawan yang berkumpul di depan kantor DPP PDI tersebut sebagian meninggalkan tempat, termasuk Roy BB Janis S.H. (ketua DPP PDI Jakarta pada waktu). Pada saat itu kepala Satgas DPP PDI juga tidak ada di kantor, dan massa yang ada di kantor pun tidak mengira bahwa akan terjadi serangan dikemudian.⁹

Akan tetapi ternyata serangan terjadi sekitar pukul 06.00 WIB, dimana kantor DPP PDI didatangi empat buah truk berwarna kuning dan kebanyakan dari penumpangnya berpakaian merah. Mereka lalu menyerbu

⁸ FX Rudi Gunawan, *op.cit.*, h. 93.

⁹ Kesaksian seorang wartawan yang bernama Jodi Yudono, yang menjadi salah satu saksi dalam kerusuhan 27 Juli 1996, dalam FX Rudi Gunawan, *ibid.*, h. 94-95.

secara anarkis kantor DPP PDI tersebut dengan cara merusak dan melakukan pembakaran. Massa anarkis tersebut menamakan diri sebagai pendukung Soerjadi, Ketua PDI hasil kongres Medan. Kongres yang memicu konflik internal PDI yang menurut para aktivis PRD sebagai akibat intervensi ABRI dan pemerintah yang tidak menghendaki naiknya Megawati sebagai pimpinan PDI.

Di lain tempat, massa yang berkumpul di sekitar Stasiun Cikini ternyata sudah bentrok dengan aparat keamanan. Yel-yel *ABRI Pembunuh!* secara lantang diteriakan oleh massa. Bentrokan itu kemudian memancing massa yang ada di halaman kantor YLBHI. Mereka mulai berlarian ke arah Salemba dan kemudian sejumlah kendaraan dan bangunan mulai terbakar di daerah Salemba dan Diponegoro. Beberapa hari kemudian, Menkopolkam mengumumkan secara luas kepada publik bahwa kerusuhan 27 Juli 1996 didalangi oleh para aktivis PRD.

Para aktivis PRD sempat berdiskusi mengenai kerusuhan 27 Juli tersebut dan menyimpulkan bahwa pemerintah dan ABRI bermaksud melakukan pembersihan terhadap PRD dan gerakan prodemokrasi lainnya dengan menggunakan momentum peristiwa 27 Juli sebagai dalih untuk melakukan pembersihan tersebut. Dan sejak hari itu, ketika Jakarta masih mengepulkan asap dari reruntuhan bangunan yang masih terbakar, dimulailah sebuah babak baru yang mencekam dalam kehidupan para aktivis PRD.

Arsitek operasi politik 27 Juli 1996 yang bersumber dari perintah lisan Presiden Soeharto adalah Pangab Jenderal Faisal Tanjung, Mendagri

Yogie Metmet, dan Menko Polkam Soesilo Soedarman.¹⁰ Perwira tinggi ABRI yang semuanya berasal dari Angkatan Darat, secara agresif melancarkan propaganda hitam membangun mitos bahwa PRD adalah bentuk baru komunisme atau PKI yang hendak melakukan makar.

Lima hari setelah peristiwa 27 Juli 1996, tak lama setelah PRD dituduh sebagai pelaku sekaligus dalang kerusuhan tersebut, Pangdam Jaya yang saat itu dijabat oleh Mayjen Sutiyoso (beliau kemudian menjadi gubernur Jakarta), memberikan perintah tembak di tempat terhadap para pelaku kerusuhan.¹¹

ABRI dan pemerintah rupanya sudah secara terbuka menyatakan “perang” terhadap PRD dalam eksistensinya sebagai sebuah partai oposisi. Hal ini wajar karena selama kurang lebih tiga puluh tahun Orde Baru berkuasa, tidak ada yang secara terang-terangan menyatakan diri sebagai oposisi, lebih lagi berbentuk partai politik.

Situasi saat itu ternyata menjadi sangat genting bagi para aktivis PRD, terutama setelah dikeluarkannya perintah tembak di tempat bagi mereka. Situasi yang membuat para aktivis PRD tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa menyelamatkan diri dengan segala keterbatasan karena pengejaran terus dilakukan dengan gencar oleh pihak aparat. Akan tetapi, hidup dalam perburuan tidak serta merta membuat mereka putus asa dan patah semangat. Mereka tetap berusaha menjaga kontak satu sama lain sesama aktivis PRD serta kelompok-kelompok yang bersimpati dan yang mereka percayai.

¹⁰ “Menyikap Tragedi 27 Juli” dalam *Tempo*, 1 Agustus 1999.

¹¹ *Kompas*, 31 Juli 1996.

Sementara itu, pengrebekan-pengrebekan oleh pihak keamanan terhadap kantor sekretariat PRD terus dilakukan di berbagai daerah. Ironisnya, pengrebekan tersebut selalu diikuti dengan perampasan aset-aset milik organisasi seperti komputer, mesin faks, telepon dan buku-buku serta artikel-artikel PRD. Alhasil, drama akhir dari pencarian dan perburuan tersebut yaitu tertangkapnya para aktivis PRD secara terpisah di berbagai tempat.

Buah dari berbagai pengejaran dan pemburuan pemerintah kepada para aktivis PRD tersebut yaitu tertangkapnya Budiman Sudjatmiko bersamaan dengan 7 aktivis PRD lainnya pada 11 Agustus oleh 1996 Badan Inteljen ABRI di rumah Beny Sumardi (kakak Romo Sandyawan), di daerah Bekasi. Mereka dibawa ke kantor BIA dengan kedua mata ditutup dengan kain hitam.

Dari tanggal 11-17 Agustus 1996, Garda Sembiring dan beberapa anggota PRD lainnya juga ditangkap oleh BIA di daerah Depok dan tempat terpisah lainnya. Saat terjadi penangkapan kedua mata mereka ditutup, diintrogasi, dan sempat mengalami penyiksaan.

Pada tanggal 10 September 1996, Wilson (basis SPRIM dan PPBI) dan Anom Astika (Departemen Pendidikan dan Propaganda PRD 1996-1999) ditangkap oleh Kesatuan Intel Polwil Ungaran, Poltabes Semarang dan Kodam Diponegoro. Berangkat dari sinilah, kemudian untuk beberapa saat PRD pun mengalami kevakuman dan stagnasi.

Selanjutnya dari bulan November 1996 hingga Juni 1997, para aktivis PRD akhirnya disidang dalam berbagai pengadilan di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Surabaya. Diantaranya yaitu persidangan atas Dita Indah Sari (basis PPBI), Coen Husen Pontoh (basis STN), dan Mohammad Sholeh (basis SMID Surabaya) pada bulan November 1996 di Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka didakwa dengan pasal *anti-subversif*. Adapun hasil persidangan tersebut yaitu Dita Indah Sari 6 tahun, Coen Husen Pontoh 4 tahun, dan Moh Sholeh 4 tahun.

Pada bulan Januari 1997, dilaksanakan persidangan terhadap ketua umum PRD Budiman Sudjatmiko, Jacobus Kurniawan, Ignatius Pranowo, Bortholemeus Garda Sembiring dan Suroso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Semuanya didakwa dengan pasal-pasal anti-subversif. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga dimulai persidangan antas para kader PRD antara lain Petrus H Harianto, Ken Budha Kusumandaru, Victor da Costa, Putut Arintoko, Anom Astika dan Wilson.

Pada bulan Februari, 3 aktivis PRD yaitu Petrus Bimo Anugerah, Henri dan Ilham ditangkap oleh Polda Metro Jaya karena menyebarkan selebaran Koalisi Mega-Bintang-Rakyat. Ketiganya ditahan hingga akhir bulan April dengan status tahanan luar dan wajib lapor kepada Polda.

Selanjutnya baru pada bulan April lah kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya menjatuhkan vonis kepada pimpinan dan para aktivis PRD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Vonis tersebut antara lain; Budiman Sudjatmiko divonis 13 tahun, Garda Sembiring divonis 12 tahun, Ignatius

Pranowo divonis 9 tahun, Jacobus Kurniawan divonis 8 tahun dan Suroso divonis 7 tahun. Semuanya aktivis PRD tersebut ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat.¹²

Pada saat sidang pembacaan vonis PRD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di saat bersamaan anggota-anggota PRD mengadakan aksi di halaman pengadilan. Aksi tersebut kemudian dibubarkan oleh aparat keamanan dengan cara represif. Dua orang anggota PRD Anom Winanto dan Harris Musi Akbar ditangkap oleh Polres Jakarta Pusat. Keduanya di sidang oleh PN Jakpus dan divonis 5 bulan penjara. Keduanya lalu ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat.

Pada bulan Mei di tahun yang sama, vonis juga dijatuhkan kepada beberapa aktivis PRD diantaranya; Petrus H Harianto 6 tahun, Ken Budha Kusumandaru 4 tahun, Victor da Costa 1,5 tahun dan Putut Arintoko 1,5 tahun. Semuanya ditahan di Lembaga Perasyarakatan (LP) Cipinang.

Selanjutnya pada bulan Juni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepada 2 aktivis PRD antara lain; Wilson 5 tahun dan Anom Astika 4 tahun. Keduanya ditahan di LP. Cipinang. Pada tanggal 27 Juli, anggota PRD yang diantaranya Joni Fadli, ditangkap oleh Pokes Jakarta Pusat ketika menyebarkan selebaran Koalisi Mega-Bintang Rakyat di Jalan Diponegoro. Ia disidang oleh Pengadilan Jakarta Pusat dan divonis 7 bulan penjara dan ditahan di Rutan Salemba.

¹² KPP-PRD, *Demi Demokrasi, Partai Rakyat Demokratik (PRD) Menolak Takluk*, (Jakarta: tidak diterbitkan, 1999), h. 34.

Seiring vonis pidana terhadap para aktivis PRD, kampanye anti-PRD pun terus dipropagandakan melalui berbagai cara yang sama yaitu mencap PRD sebagai PKI yang mencoba melakukan tindakan subversif melalui peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996. Informasi direkayasa sedemikian rupa, seolah-olah peristiwa 27 Juli adalah akibat persekongkolan maker, dimana PRD menjadi actor sekaligus faktor utamanya. Salah seorang yang gencar melakukan kampanye ini adalah Kassospol ABRI, Letjen TNI Syarwan Hamid. Ia mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:

“Komunis di Indonesia dengan PRD-nya yang merupakan metamorfosa PKI berusaha bangkit kembali dengan menggunakan cara agitasi, adu domba, provokasi dan teror, tidak menghendaki Negara Indonesia aman dan berhasil dalam pembangunan berdasarkan Pancasila dan UUD 45”¹³

Berbagai kecaman dan bahkan kutukan juga mulai mengarah kepada para aktivis PRD. Puluhan ormas mengutuk PRD sebagai kelompok komunis pembuat keonaran. Mereka mendukung tindakan pemerintah dan ABRI dalam memberangus keberadaan PRD yang dianggap sebagai dalang kerusuhan 27 Juli 1996. Meskipun demikian, ternyata masih ada pihak yang tidak menerima seutuhnya pendapat dan pernyataan dari pihak pemerintah dan ABRI, dan bahkan menganggap bahwa kerusuhan 27 Juli adalah sebuah tindakan kekerasan yang murni dilakukan oleh pihak aparat keamanan. Mereka antara lain yaitu Komnas HAM, GMNI, PMKRI, dan PMII.

Kerusuhan 27 Juli yang tampaknya memukul gerakan prodemokrasi, ternyata justru menimbulkan radikalisisi dikalangan rakyat. Tercatat pasca

¹³ Sepuar Kudatuli, *Kompas*, 24 Agustus 1996

peristiwa tersebut, massa PDI Mega tetap melaksanakan aktivitas mimbar bebas di berbagai tempat, sidang terhadap kader PDI Mega selalu dipadati oleh ribuan masyarakat.

Di kalangan rakyat, peristiwa 27 Juli justru memantik perlawanan karena kondisi rakyat yang kian hari makin terjepit. Berbagai kerusuhan terjadi seperti di Tasikmalaya, Situbondo, Lampung dan beberapa daerah lainnya¹⁴. Pemicunya adalah tindakan aparat yang sewenang-wenang ditambah dengan akumulasi kemarahan dan ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan rejim Orde Baru yang memarjinalisasikan rakyat.

Dengan demikian disimpulkan bahwa peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 tersebut makin memperkokoh keyakinan pada khalayak luas bahwa politik kekerasan makin biasa terjadi dalam realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta tidak mencerminkan keseriusan dan ketulusan untuk tunduk pada landasan etika, moral, dan integritas politik.

3. Perjuangan Bawah Tanah

Penumpasan barisan prodemokrasi yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru terhadap elemen mahasiswa khususnya yang dimotori oleh PRD, ternyata hanya efektif untuk menyebarkan ketakutan dalam jangka waktu yang sementara. Selama semester kedua tahun 1996, masih muncul

¹⁴ Suharsih dan Ign K Mahendra, *Bergerak Bersama Rakyat: Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Resist Book, 2007), h. 98.

sedikitnya 36 aksi demonstrasi di 11 kota yang sebagian besar terjadi di Jakarta, Bandung dan Yogyakarta.

Di Semarang aksi solidaritas dan menentang pemberitaan sepihak oleh pers mengenai peristiwa 27 Juli 1996 dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Semarang (AMS) pada 2 Agustus 1996. Beberapa aksi yang menyangkut isu 27 Juli 1996 dan isu politik sensitif lainnya mendapatkan represi yang keras, baik yang langsung dilakukan oleh aparat keamanan maupun oleh preman-preman binaan Orde Baru.¹⁵

Aksi-aksi protes terkait represifitas Orde Baru ternyata juga dilakukan di negara-negara lain, misalnya pada tanggal 28 Oktober 1996 yang bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda. Aksi tersebut dinamai Hari Protes Internasional untuk HAM dan Demokrasi di Indonesia yang diokordinasi secara internasional oleh Max Lane, aktivis Action Solidarity for Indonesian and East Timor (ASIET), dan Nico Warrouw (perwakilan internasional PRD). Beberapa aksi tersebut dilaksanakan antara lain: di Australia, dimana lebih dari 10.000 orang menandatangani petisi yang mendukung Budiman Sudjatmiko (ketum PRD), Dita Indah Sari (PPBI), Muchtar Pakpahan (SBSI) dan semua tahanan politik di Indonesia.

Di Netherland, aksi dilakukan oleh Partai Buruh Sosialis, Aksi Setia Kawan, Kelompok Kerja Pernama, Yayasan Tragedi Indonesia dan organisasi lainnya di Pusat kota Amsterdam. Mereka mendirikan tenda besar di tengah alun-alun pusat kota dan sekitar tenda digantungkan beberapa poster yang

¹⁵ Muridan S Widjoyo, dkk, *Penakluk Orde Baru: Gerakan Mahasiswa '98*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), h. 149.

berbunyi: “Dukung Gerakan Demokrasi di Indonesia”, “Hapus Dwi Fungsi ABRI”, “Cabut 5 UU Politik tahun 1985 yang anti demokrasi”, “ Stop kerjasama militer dengan Indonesia”, dan juga “Boikot Soeharto”.¹⁶

Di India, wakil dari Asosiasi mahasiswa Seluruh India dan Dewan Serikat Buruh India berpidato pada aksi jaga di kantor kedutaan Indonesia di New Delhi. Aksi-aksi solidaritas serupa juga dilakukan di San Fransisco, Amerika Serikat, Stockholm dan Guttenburg, Swedia, serta Kanada dan Perancis. Isu yang diangkat dari berbagai tempat tersebut rata-rata sama.

Setelah perburuan, penangkapan, penyiksaan, pengadilan dan pemenjaraan atas para aktivis prodemokrasi khususnya PRD, maka ruang gerak PRD secara otomatis jatuh dalam titik terendah. Propaganda Orde Baru bahwa PRD komunis tampak berhasil menghancurkan PRD. Puncak represifitas atas keberadaan PRD adalah dengan mengeluarkan SK Mendagri yang menyatakan PRD beserta ormas-ormasnya yang berafiliasi sebagai partai terlarang. Pelarangan ini memasuki tahapan baru dalam eksistensi PRD yaitu Perjuangan bawah tanah.

Untuk melanjutkan perjuangan, Ketua Umum PRD Budiman Sudjatmiko dan pengurus lainnya di penjara memberikan mandat kepada para aktivis yang berada di luar penjara untuk terus memimpin perjuangan melawan kediktatoran Orde Baru. Dengan mandat tersebut, maka dibentuklah sebuah kepemimpinan kolektif Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD). Adapun tugas dari KPP PRD ini adalah melakukan

¹⁶ Suharsih dan Ign K Mahendra, *Op.cit.*, h. 96-97.

reorganisasi atas PRD yang telah diberangus oleh pemerintah Orde Baru. Seluruh aktivis yang bersembunyi di berbagai kota mulai dikumpulkan dan membagi kerja politik untuk tetap membangun kekuatan rakyat melawan kediktatoran Orde Baru.

Dalam masa kerja-kerja politik, KPP PRD berupaya menjaga kontinuitas dengan aktivitasnya, terutama selebaran-selebaran yang berisi pernyataan sikap dan penilaian-penilaian politik nasional mutakhir. Secara subjektif, KPP PRD terus membangun moralitas perjuangan para anggota dan simpatisannya dengan cara menggarisbawahi :

Peristiwa 27 Juli 1996 mengokohkan sikapnya untuk menilai bahwa rejim harus dilawan. Ini berarti perjuangan PRD yang berazas sosial demokrasi kerakyatan yang menuju Indonesia yang demokratik dan multipartai harus tetap jalan, meski terror putih dan represi siap menghadangnya.¹⁷

Keputusan untuk bergerak di bawah tanah yang dikeluarkan pengurus pusat PRD sebenarnya merupakan sebuah keputusan yang sementara sifatnya. Jika situasi politik telah memungkinkan bagi para aktivis PRD untuk bergerak secara terbuka, sudah pasti mereka tidak akan bergerak secara tertutup. Selain itu, pertimbangan penting lainnya adalah mengenai keselamatan para aktivis PRD yang berada di luar penjara, hal itu agar kiranya program-program kerja politik PRD bisa terus dijalankan oleh mereka.

Pergerakan bawah tanah dalam kondisi diburu seperti itu bagi para aktivis PRD tidaklah mudah. Apalagi mengingat banyaknya orang yang bisa

¹⁷ Pernyataan Sikap aktivis PRD, dikutip dalam Muridan S Widjono, *Op.cit.*, h. 147.

saja ternyata intel. Dalam berhubungan dengan pihak luar, hanya kurir lah yang menjadi satu-satunya alat penghubung mereka sehingga kurir dianggap memegang peranan yang sangat penting. Namun di sisi lain, kurir jugalah yang bisa menjadi kunci keberadaan mereka bagi para pemburu yang terus masih mengintai. Khususnya bagi para aktivis PRD yang masih dalam tempat persembunyian.¹⁸

Dalam perjuangan bawah tanah, KPP PRD selanjutnya menerbitkan media/pers partai yang bernama "*Pembebasan*" sebagai alat propaganda, koordinasi dan pengembangan organisasi. Aksi-aksi politik tetap dijalankan dengan menggunakan komite-komite aksi non-permanen. Tugas partai pada saat ini lebih pada memberikan koordinasi kehendak politik anggota-anggotanya yaitu berupa agenda seperti penggulingan Presiden Soeharto, mencabut 5 UU Politik tahun 1985, mencabut Dwifungsi ABRI dan upaya referendum bagi rakyat Maubere.

Intruksi perjuangan bawah tanah pun mengalami perkembangan pesat. Terbukti para aktivis PRD masih mampu membangun komite-komite baru di lingkungan aktivis mahasiswa, walaupun tidak mencantumkan nama PRD. Perlu digarisbawahi bahwa komite-komite aksi "hasil produksi" para aktivis PRD ini dibentuk bersama dengan aktivis-aktivis dari elemen gerakan mahasiswa lain. Aliansi dibangun dengan kelompok independen, lembaga formal kampus, maupun organ-organ mahasiswa lainnya. Jadi format yang

¹⁸ Wawancara dengan Agus 'Jabo' (eks-SMID), pada Maret 2011, di KPP-PRD, Tebet, Jak-Sel.

ditampilkan tidak sepenuhnya dari PRD, namun dalam program dan aksinya dapat diidentifikasi bahwa terdapat warna PRD di dalamnya.

Beberapa komite aksi bentukan para aktivis PRD antara lain Forum Nasional untuk Reformasi Total (FNRT). FNRT merupakan payung bagi gabungan komite-komite aksi yang tumbuh di beberapa kota misalnya di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Lampung, Bandung, Solo dan kota besar lainnya. FNRT dipandang sebagai wadah forum yang mengkoordinasikan aksi tuntutan reformasi dalam rangka menyatukan semua sendi perlawanan mahasiswa dan rakyat di daerah.¹⁹ Komite-komite yang tergabung dalam FNRT tersebut menggalang elemen-elemen buruh, tani, seniman, dan masyarakat lainnya.

Di Yogyakarta berdiri Komite Nasional Penegak Demokrasi (KNPD) yang dimotori oleh kader-kader PRD. KNPD mencoba bangkit dengan upaya mengorganisir kaum buruh, tani, dan kaum miskin kota. KNPD dalam perkembangannya tidak berlangsung lama karena para aktivis yang selama ini tidak sejalan dengan format gerakan PRD, melihat bahwa warna PRD terlalu kental dalam organ KNPD ini.

Di Semarang muncul komite-komite kecil Komite Kebangkitan Mahasiswa untuk Demokrasi (KOKMUND) yang berbasis di Universitas Katholik Soegijapranata. Kader-kader PRD juga mendirikan Forum Pembebasan yang berbasis di Universitas Diponegoro. Di tingkat kota

¹⁹ Wawancara dengan Agus 'Jabo'. *Op.Cit.*,

mereka berhasil mendirikan Komite Aksi Rakyat Semarang (KARAS) pada 26 Mei 1997 dimana Unissula sebagai basisnya.²⁰

Di Solo muncul Komite Mahasiswa untuk Keadilan dan Demokrasi (KMKD) yang bekerja secara sembunyi-sembunyi untuk membangun kembali kekuatan dengan perekrutan aktivis-aktivis baru. Aksi yang pernah dilakukan oleh KMKD ini yaitu kampanye untuk memboikot Pemilu pada bulan Mei 1997. Selanjutnya dari KMKD ini terus berkembang hingga Solidaritas Mahasiswa Peduli Rakyat (SMPR) dan Dewan Reformasi Mahasiswa Surakarta (DRMS) pada era reformasi.²¹

Di Jakarta, para aktivis PRD yang berada di luar penjara membentuk Kobar. Kobar kemudian aktif dalam aksi-aksi dan advokasi kaum buruh. Di lingkungan Universitas Indonesia, para aktivis PRD dan non-PRD mendirikan Keluarga Besar UI (KBUI) pada 29 Januari 1998 di Pusat Kegiatan Mahasiswa UI Depok. Pola rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan KBUI yaitu melalui kursus-kursus politik yang dilakukan secara bertahap.

Masih di wilayah Jakarta muncul Komrad. Komrad adalah elemen mahasiswa yang dibangun oleh kalangan aktivis PRD, namun baru muncul pada akhir Juni 1998 setelah lengsernya Presiden Soeharto. Keputusan akan lahirnya Komrad ini didasarkan pada evaluasi terhadap gerakan mahasiswa 98, hingga wacana mengenai naiknya Habibie sebagai presiden RI yang

²⁰ Muridan S Widjoyo dan Moch Nurhasim, *Organisasi Gerakan Mahasiswa 98*, dalam Muridan S Widjoyo, *Penakluk Orde Baru: Gerakan Mahasiswa '98*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), h. 338.

²¹Perkembangan organ-organ mahasiswa hasil produksi para aktivis PRD lihat Muridan S Widjoyo dan Moch Nurhasim, *Ibid.*, h. 331-333.

dinilai elitis dan tidak menyatu dengan rakyat. Dari dasar itu, maka Komrad lahir dengan tekad membangun organisasi pelopor yang berwatak kerakyatan.²²

Bukti nyata bahwa PRD tetap merupakan kekuatan politik yang masih aktif dalam menggalang massa adalah munculnya gerakan Mega-Bintang-Rakyat, yang didahului oleh gerakan mega-bintangnya Mudrick Sangidoe selama kampanye pemilu 1997. Para anggota PRD memanfaatkan kesempatan politik ini untuk mengerahkan tuntutan politik rakyat kepada tuntutan-tuntutan demokratisasi yang mendesak. Ratusan ribu selebaran Mega-Bintang-Rakyat (MBR) disebar di seluruh kota Jakarta selama masa kampanye.

Di tingkatan propaganda legal, PRD kemudian membentuk Komite Nasional Perjuangan Demokrasi (KNPD) dengan Sekretaris Jenderal Nur Hikmah. KNPD ini tersebar di beberapa kota seperti Jakarta, Solo, Yogyakarta, dan Medan. KNPD bersama mahasiswa, buruh, tani dan kaum miskin kota memelopori setiap aksi massa menentang kediktatoran Soeharto. Sementara itu, pengorganisasian PRD bawah tanah ditujukan untuk menggalang kekuatan persatuan antara elemen-elemen rakyat tersebut.²³

Pada bulan Agustus 1997 melalui pertemuan bawah tanah Dewan Nasional di Jakarta. PRD memutuskan untuk memanfaatkan SU MPR 1998 sebagai kesempatan untuk menggulingkan Presiden Soeharto. Sementara itu, KNPD sebagai corong propaganda PRD di tingkatan legal menggalang

²² Muridan S Widjoyo dan Moch Nurhasim, *Op.cit.*, h. 336.

²³ KPP-PRD, *Op.cit.*, h. 26.

potensi kekuatan oposisi melalui deklarasi Dewan Penyelamatan Kedaulatan Rakyat (DPKR) di kantor YLBHI. DPKR ini merupakan semacam direktorat yang mencoba menyatukan tokoh-tokoh oposisi yang secara politik merupakan cikal bakal dari pemerintahan sementara.

Di hal lain, Orde Baru tampaknya sadar bahwa para aktivis PRD yang berada di luar penjara masih terus aktif dalam kerja-kerja politik dalam menghimpun kekuatan melalui aksi-aksi massa dan melakukan propaganda yang luas melalui selebaran-selebaran yang mengancam *status quo* Presiden Soeharto. Untuk mengamankan pemerintah dari serangan gerakan radikal-kerakyatan dicanangkanlah operasi intelejen untuk menculik dan menyiksa para anggota dan pimpinan PRD.

Sepanjang bulan Maret 1998, sepuluh orang aktivis PRD diculik oleh operasi intelejen "Tim Mawar" yang dipimpin oleh menantu Presiden Soeharto Komandan Jenderal Kopasus Mayor Jenderal Prabowo Soebianto. Mereka yang diculik antara lain; Faisol Riza, Waluyo Jati, dan Herman Hendrawan yang diculik oleh Kopassus pada 12 Maret di RS Cipto Mangun Kusumo, Jakarta Pusat. Ketiganya disiksa dengan hebat di sel bawah tanah yang tidak diketahui sampai sekarang. Jati dan Reza dibebaskan oleh penculik tanggal 5 Juni 1998. Sementara Herman Hendrawan tidak diketahui nasibnya hingga sekarang.

Tanggal 13 Maret 1998 tiga anggota PRD yaitu Nezar Patria, Aan Rusdianto dan Mugianto ditangkap oleh pasukan penculik dari Kopasus di Klender, Jakarta Timur. Ketiganya mengalami siksaan yang berat, dan

dibebaskan kemudian pada tanggal 5 Juni, 1998. Pada bulan Maret di tahun yang sama, anggota PRD Petrus Bimo Nugroho juga diculik oleh Kopassus, dan sampai sekarang belum diketahui bagaimana nasibnya.

Pada tanggal 28 Maret 1998, Ketua KPP-PRD bawah tanah, Andi Arief diculik oleh Kopassus di rumah kakaknya di Bandar Lampung. Ia kemudian ditahan di sel bawah tanah bersama aktivis PRD lainnya yang juga sudah diculik lebih dahulu, dan kemudian dibebaskan pada Juni 1998.²⁴

Jalan parlementer bagi perubahan politik telah ditutup rapat, tepat di depan pintu gerbangnya, yakni pada saat dan pasca meletusnya 27 Juli 1996. Orang-orang dipukuli, diusir, dan dibunuh di Jalan Diponegoro 58. Orang-orang kemudian dikejar, diburu, dijebak, dan ditangkap untuk kemudian diseret ke “pengadilan palsu” untuk mendengar ocehan jaksa penuntut umum. Ocehan yang dengan jumawa ditingkahi dengan kata “untuk keadilan”, yaitu keadilan menurut selera, motif, prasangka, dan reka-reka para jaksa.²⁵

Dengan demikian, Kerusuhan 27 Juli 1996 secara konspiratif digunakan oleh rejim Orde Baru sebagai pembersihan gerakan oposisi yang prodemokrasi di Indonesia. Strategi ini ditujukan untuk mematikan seluruh elemen kelompok yang secara terus menerus menyatakan kritik terhadap rejim Orde Baru secara terbuka. Dengan memberikan stigma “neo PKI”, menguatkan kembali mitos “bahaya merah”²⁶, Orde Baru bermaksud

²⁴ Berbagai peristiwa penculikan terhadap para aktivis selama kurun waktu 1998-1999 diambil berdasarkan; Kementrian Pertahanan/TNI, *Berbagai Peristiwa dan Penanganannya (1998-1999)*, Jakarta: tidak diterbitkan, h. 8-13.

²⁵ Pidato pertanggungjawaban politik PRD, h. 71.

²⁶ Human Right Watch/Asia, *Gerakan Pro-Demokrasi Digebuk: Tentang Peristiwa 27 Juli 1996*, Desember 1996.

melumpuhkan kekuatan-kekuatan yang potensial merongrong *status quo* rejim.

B. PRD pada era Reformasi

PRD yang lahir dalam gerakan mahasiswa yang muncul pada dekade awal 90-an tetap menjaga eksistensinya, walaupun telah mengalami pengalaman-pengalaman politik yang berat dan panjang. Di luar PRD, Ratusan komite mahasiswa juga lahir dan berubah-ubah bentuk seiring dinamika konstelasi politik nasional, dan tidak sedikit yang mengalami represifitas dan pemenjaraan.

Kelompok-kelompok gerakan mahasiswa yang baru tersebut termasuk PRD di dalamnya, yang terus-menerus membuktikan perlawanan panjang terhadap pemerintah Orde Baru yang pada kurun waktu sebelum 1998 memang masih kuat. Peristiwa 27 Juli 1996 dan sesudahnya adalah saat-saat tersulit bagi aktivis gerakan mahasiswa. Di tengah mayoritas komunitas mahasiswa yang saat itu telah terpukul mundur, akan tetapi para aktivis yang telah berjuang sejak era 90-an ini minoritas yang berjuang sendirian.²⁷

Dalam alur politik, kalangan aktivis inilah yang kemudian pada era reformasi disebut sebagai aktivis Gerakan Anti Orde Baru (GAO). GAO merupakan kelompok aktivis mahasiswa yang cenderung radikal dan independen serta lugas menentang Orde Baru. Para mahasiswa ini kendati terus berhadapan dengan ancaman represifitas dan pemenjaraan, secara

²⁷ Wawancara dengan Harris Sitorus para aktivis PRD lainnya, pada Maret 2011, di KPP PRD, Tebet, Jak-Sel.

konsisten terus menggoyahkan keberadaan pilar utama kekuasaan politik OB yaitu paket 5 UU politik dan dwifungsi ABRI, dan kemudian punya pengaruh besar dalam melengserkan Presiden Soeharto serta mencapai reformasi.

1. Lengsernya Soeharto

Paruh kedua 1997 adalah awal dari bencana ekonomi Indonesia yang ditandai oleh melemahnya nilai rupiah. *Internasional Monetary Fund* (IMF) mengumumkan paket bantuan keuangan senilai US\$ 23 milyar pada Oktober 1997, lalu diikuti langkah pemerintah dengan melikuidasi 16 bank pada 1 November 1997. Pada Desember 1997 hingga Januari 1998, krisis kian memburuk. Nilai rupiah sudah “terjun bebas” dari sekitar Rp 4 ribu ke Rp 11 ribu per US\$ 1. RAPBN yang dibacakan Presiden Soeharto pada 6 Januari 1998 tidak menunjukkan kesungguhan rejim Orde Baru untuk melakukan reformasi ekonomi dan masih mengatakan bahwa “badai pasti berlalu”.²⁸

Kritik keras dari IMF pada konsistensi pemerintah Indonesia segera memunculkan rumor di dalam dan di luar negeri bahwa IMF akan menghentikan pencairan bantuan dana tahap kedua sebesar US\$ 3 milyar. Akibat pidato RAPBN dan reaksi IMF, “pasar bereaksi secara negatif” dan nilai rupiah semakin terpuruk menembus angka Rp 12.000 per US\$ 1.²⁹

Pada tanggal 15 Januari 1998, di bawah tekanan IMF, Soeharto menekan *letter of intent* yang berisi 50 butir kesepakatan, diantaranya; revisi RAPBN 1998/1999, penghapusan monopoli oleh Bulog dan oleh Badan

²⁸ Seputar Krismon, *Kompas*, 19 Mei 1998.

²⁹ Sri Mulyani I. Sumartono, Revisi RAPBN, dalam *Gatra*, 24 Januari 1998.

Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC), dihapuskannya fasilitas pajak bagi industri mobil nasional Timor dan ditutupnya sumber pendanaan untuk Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).³⁰

Sementara di dalam negeri, semakin jatuhnya nilai rupiah mengakibatkan kepanikan konsumen golongan menengah ke atas. Mulai 9 Januari 1998, mereka secara panik memborong sembako di pasar-pasar swalayan dan di pasar-pasar tradisional. Aksi pembelian sembako besar-besaran terjadi serempak di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan. Aksi ini membuat harga kian melambung tinggi dan akibat lainnya konsumen kelas bawah di pasar-pasar tradisional kian menderita.

Dunia usaha di sektor properti, otomotif, elektronik, petrokimia, sepatu, perunggasan, susu, hingga tempe, yang banyak mengandalkan bahan baku impor dan banyak berhutang dalam dolar dibuat tidak berkitik dengan anjloknya nilai rupiah.³¹

Hutang swasta yang diperkirakan berjumlah US\$ 65 milyar belum jelas penyelesaiannya karena tidak disinggung dalam paket IMF. Semakin turun nilai rupiah, semakin bengkak pula hutang swasta. Ancaman akan ambruknya dunia usaha ini sudah pasti kemudian melahirkan bencana lanjutan yaitu gulung tikar, lalu PHK, dan akhirnya pengangguran besar-besaran.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Ted Grant dan Allan Woods, Indonesia: Revolusi Asia Telah Dimulai, dalam http://www.geocities.com/frontnasional/marxisme_dan_perjuangan_melawan_hmt (diakses Maret 2011)

Sebagian besar mahasiswa juga merupakan korban dari krisis ekonomi tersebut. Kebutuhan kehidupan sehari-hari, kebutuhan alat tulis, dan biaya kuliah semakin tidak terjangkau. Secara umum mahasiswa menghayati krisis ekonomi melalui terhentinya kiriman orang tua di kampung, melonjaknya harga kertas, biaya fotokopi, bahan praktikum dan lain-lain. Di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, 500 dari 11 ribu mahasiswa menunda pembayaran SPP. Di Umpati Ambon, 300 dari 8600 mahasiswa tidak mendaftar ulang karena tidak mampu melunasi SPP. Problem serupa juga menimpa mahasiswa daerah-daerah seperti Universitas Brawijaya Malang, UGM Yogyakarta, dan lain-lain.³²

Keresahan masyarakat atas krisis ekonomi yang berdampak pada melangitnya harga-harga sembako dan ancaman putus kuliah serta masa depan yang suram, menjadi faktor penggerak tersendiri bagi kalangan kampus dan mahasiswa untuk menyatakan berbagai bentuk protes dan aksi. Maraknya aksi demonstrasi di berbagai kota sudah ramai sejak awal 1998. Represi dan kebrutalan dari aparat militer justru memancing aksi-aksi protes yang lebih luas lagi. Kualitas dan kuantitas aksi-aksi demo makin mengalami peningkatan. Terhitung dari tanggal 1 Mei hingga 20 Mei 1998, tercatat lebih dari 445 aksi demonstrasi yang merata di seluruh Indonesia.³³

Pada momentum itulah para aktivis mahasiswa benar-benar mendominasi wacana politik. Aksi-aksi mahasiswa mampu menarik dan

³² Kuliah di Tengah Badai Krisis, *Kompas*, 2 Mei 1998.

³³ Muridan S Widjoyo, *Turunkan Harga, atau Kami Turunkan Kamu!*, dalam Muridan S Widjoyo, *Penakluk Orde Baru: Gerakan Mahasiswa '98*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, h 167-169.

menghadirkan massa yang besar, serta dengan dukungan media massa pada akhirnya mampu menyudutkan pemerintah Orde Baru. Jargon-jargon “Reformasi” dan sekaligus berarti “Turunkan Soeharto” bergema di seluruh pelosok negeri.

Bentrok demi bentrok antara mahasiswa dan aparat militer serta kepolisian sejak Februari sampai Mei 1998 memperbesar solidaritas barisan gerakan mahasiswa dari berbagai kelompok. Fase ketakutan yang selama ini membayang-bayangi mahasiswa akibat represi Orde Baru, akhirnya sudah terlampaui. Di kalangan mahasiswa, rekor bentrokan dengan aparat bahkan menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka. Semakin banyak bentrok terjadi, semakin terbangun opini publik yang bersimpati mendukung gerakan mahasiswa tersebut.

Insiden penting yang sangat berpengaruh pada membesarnya gelombang mahasiswa saat itu adalah peristiwa terbunuhnya empat mahasiswa Trisakti yaitu Heri Hartanto, Elang Mulya, Hendriawan Lesmana dan Hafidin Royan. Tewasnya mahasiswa Trisakti tersebut makin meningkatkan opini publik nasional yang anti pemerintah. Pernyataan solidaritas mengalir dari masyarakat seluruh penjuru tanah air. Kecaman, kesedihan, dan caci maki spontan emosional yang muncul di berbagai media massa cetak dan elektronik tertuju ke arah pemerintah.³⁴

Penembakan hingga tewas empat mahasiswa Trisakti tersebut diikuti segera oleh kerusuhan massal di pusat-pusat kegiatan ekonomi di Jakarta.

³⁴ Cerita di balik mundurnya Soeharto, *Kompas*, 27 Mei 1998.

Massa yang terkesan terorganisir bergerak kesana kemari menuju pusat-pusat keramaian, membuat provokasi terhadap massa setempat, dan sebagian melakukan kekerasan dan pemerkosaan pada warga etnis Tionghoa.

Aksi-aksi demo mahasiswa kian massif, merata dan bersemangat. Puncak dari aksi-aksi mahasiswa yang terbesar dan berpengaruh besar dalam mempercepat pengunduran diri Soeharto adalah saat pendudukan puluhan ribu massa mahasiswa di Gedung DPR RI sejak tanggal 18 Mei hingga 22 Mei 1998. Gedung DPR RI semakin banyak didatangi para pengunjung rasa menyusul insiden Trisakti, dan pada tanggal 18 Mei 1998 mulai mengalir ribuan mahasiswa ke sana.

Tidak ada hambatan berarti yang dilakukan aparat. Pada hari itu tuntutan sidang istimewa dan turunkan Soeharto sangat dominan. Aksi pendudukan ini menjadi pusat perhatian nasional dan internasional. Selain mahasiswa, tokoh-tokoh politik nasional, tokoh LSM dan berbagai lapisan berdatangan dan menyatakan dukungannya pada gerakan mahasiswa.

Di hal lain, Soeharto semakin yakin bahwa Ia hanya punya satu pilihan yaitu melepaskan jabatan dan kekuasaan yang dipertahankannya selama 32 tahun. Gelombang raksasa gerakan mahasiswa yang didukung oleh elemen-elemen masyarakat tidak lagi menghendaknya. Sementara itu elit-elit politik dan birokrasi yang selama ini loyal dan melindungi dan dilindungi oleh kekuasaannya, sudah berbalik arah dan menghendaki Soeharto lengser. Alhasil, pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 09.00 WIB, di Istana Merdeka Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya.

Saat-saat bersejarah itu disiarkan secara langsung oleh seluruh stasiun televisi baik milik pemerintah ataupun swasta. Pidato pendek pernyataan mundurnya Soeharto itu serta merta disambut sukacita oleh masyarakat Indonesia. massa mahasiswa yang sudah 3 hari menduduki Gedung DPR/MPR melonjak kegirangan. Di berbagai kota pengunduran diri Soeharto tersebut disambut dengan aksi syukur bahwa era baru akan mewarnai kehidupan politik di Indonesia.

2. Perjuangan Parleментар

Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto berhasil ditumbangkan oleh gerakan massa yang dipelopori mahasiswa. Tumbangnya seorang Jenderal Soeharto diyakini mampu membuka ruang politik yang selama 32 tahun ditutup rapat. PRD memandang penting untuk memanfaatkan keterbukaan politik yang terpaksa lebih dibuka setelah tumbangnya Presiden Soeharto, yakni dengan memunculkan PRD secara terbuka di depan rakyat dan kekuasaan Orde Baru yang masih bertahan.

Pada bulan Juni 1998, atas mandat yang diwakili oleh Budiman Sudjatmiko dan Petrus Hari Harijanto, pimpinan pusat PRD di penjara dan anggota-anggota lainnya maka diumumkan lah Komite Persiapan Legalisasi PRD (Kepal-PRD). Kepala-PRD diketuai Hendri Kuok dan Sekretaris Ida Nasim Mh. Tugas Kepala-PRD adalah memanfaatkan ruang politik yang lebih terbuka untuk menuntaskan proses reformasi pada tuntutan-tuntutan strategis dengan program utama Pencabutan Dwifungsi ABRI, penolakan

pemerintahan Habibie dan pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya melalui sebuah pemerintahan transisi.

Kepal-PRD menjadi juru bicara partai kepada kaum oposisi, juga kepada pemerintahan Habibie-ABRI. PRD menyimpulkan beberapa hal tentang situasi politik dalam buku yang diterbitkan oleh Komite Persiapan Legalisasi (Kepal-PRD) yaitu antara lain :³⁵

Pertama, Presiden Soeharto sebagai presiden resmi sudah mundur tapi pemerintah Orde Baru masih berkuasa. Ditunjuknya Habibie sebagai presiden sementara dianggap hanya untuk meredam perlawanan rakyat yang memuncak, karena akan mengakibatkan kerugian fatal secara ekonomi dan politik. PRD meyakini bahwa proses penunjukan Habibie oleh Soeharto sebagai penggantinya membuktikan bahwa Soeharto masih bisa berkuasa. Soeharto masih dapat memilih siapa yang harus menggantikan posisinya, dengan alasan-alasan konstitusional dan kompromi dari para kaum oposisi gadungan.

Kedua, Tentara masih setia dan dapat dikuasai oleh Soeharto. Pewarisan kursi kepresidenan Soeharto kepada Habibie, yang dianggap menyalahi mekanisme reformasi demokratik, mendapat dukungan dari tentara yang secara resmi disampaikan oleh Panglima ABRI Jenderal Wiranto pada saat yang bersamaan. Hal ini karena ABRI yang biasanya menunjukkan sikap congkak terhadap politisi sipil, tidak sedikitpun mengisyaratkan reaksi negatif

³⁵ Kepal-PRD, *Demokrasi Multi Partai; Demokrasi Tanpa 5 UU Politik 1985 dan Dwi Fungsi ABRI*, Jakarta: Tidak Diterbitkan, 1998.

terhadap kepemimpinan Habibie. Ini membuktikan bahwa ABRI dan Habibie masih dalam satu klik, yaitu klik kekuasaan Orde Baru.

Ketiga, Di tingkat bawah rakyat masih resah karena belum ada perbaikan kehidupan secara nyata. Kondisi perekonomian semakin memburuk yang berimbas pada semakin beratnya kehidupan masyarakat. Kondisi seperti ini berpotensi pada kerusuhan yang sewaktu-waktu dapat meledak bila tak ada kepemimpinan politik.

Keempat, Aksi-aksi mahasiswa untuk sementara waktu mengalami sedikit penurunan, tapi masih ada kemungkinan untuk kembali meledak bila menemukan kesempatannya. Persoalan menurunnya kuantitas aksi adalah persoalan kesempatan yang berarti bahwa aksi-aksi tersebut akan mengalami bilangan yang naik dan turun tergantung kesempatannya serta tidak konstan.

Kelima, Media massa resmi sudah mempunyai keberanian yang luar biasa. Media massa yang sejak Orde Baru berkuasa mengalami represifitas, pada saat Soeharto tumbang sudah mulai berani mengungkap fakta-fakta dan pendapat yang sebelumnya mustahil dilakukan. Namun keterbukaan yang sifatnya permanen tersebut kemungkinan masih dapat direnggut. Keterbukaan yang terjadi pada saat itu merupakan hasil jerih payah rakyat dan mahasiswa yang terus menerus mendesak tuntutan demokratik.

Dan *Keenam*, Terdesaknya pemerintahan Orde Baru Soeharto, telah memaksa Syarwan Hamid (Mendagri saat itu) mengizinkan berdirinya partai-partai baru. Hal tersebut disambut dengan gagap gempita oleh para politisi yang selama kepemimpinan Orde Baru terkekang.

PRD menyimpulkan bahwa lampu hijau untuk mendirikan partai-partai adalah sebuah konsesi politik, yaitu sogokan yang diberikan pemerintah Habibie-ABRI agar terbuai seolah-olah demokrasi sudah teraktualisasi. Bagi PRD berdirinya partai-partai baru di era reformasi saat itu belum berarti bahwa bangsa Indonesia telah menerapkan sistem multi partai.

Pada bulan Oktober 1998, PRD mengadakan kongres II di Yogyakarta. Dalam hal organisasi, kongres memutuskan pembentukan Komite Pimpinan Pusat PRD (KPP-PRD) sebagai pelaksana harian dari amanat kongres dan amanat-amanat politik dari para aktivis PRD yang telah mendekam di penjara maupun yang berada di luar penjara. Terpilih sebagai pengurus KPP PRD yaitu antara lain; Faisol Reza sebagai ketua, Ida Nasim sebagai Sekretaris, Wilson sebagai Departemen Pendidikan dan Propaganda, Ken Budha Kusumandaru sebagai Departemen Organisasi, Wignyo sebagai Departemen Perjuangan, Nor Hiqmah sebagai Departemen Kerjasama, serta Victor da Costa sebagai Departemen Dana dan Usaha.³⁶

KPP-PRD lalu diberi wewenang untuk melakukan pengembangan organisasi dengan membentuk Komite Pimpinan Wilayah PRD (KPW-PRD) di tingkat propinsi dan pembentukan Komite Pimpinan Kota PRD (KPK-PRD) di tingkat kabupaten/kotamadya.

Dalam ranah politik, kongres terus mengadakan diskusi-diskusi untuk menyasati kesempatan-kesempatan penyelenggaraan pemilu. Pada tanggal 13-15 februari 1999 Dewan Nasional PRD mengadakan Rapat Kerja Nasional

³⁶ KPP-PRD, *Op.cit.*, h. 36.

PRD (Rakernas) di Jakarta yang dihadiri 12 wilayah/propinsi. Adapun hasil Rapat Kerja Nasional tersebut, KPP-PRD mengumumkan secara resmi taktik PRD selanjutnya yaitu berpartisipasi dalam pemilu. Dalam ranah ideologi diputuskan juga untuk tetap mempertahankan sosial demokrasi kerakyatan sebagai azas partai.

Bagi aktivis PRD, azas sosial demokrasi kerakyatan harus diterjemahkan dalam perjuangan pembentukan suatu sistem politik yang demokratis untuk memudahkan terciptannya peranan pengawasan publik/sosial yang lebih kuat terhadap kehidupan politik, terhadap para pemilik modal dan mengenai transparasi kekayaan Negara.

Pada tanggal 16 februari 1999, PRD pun melaksanakan jumpa pers kepada masyarakat luas dalam rangka mengumumkan secara resmi keputusan PRD untuk ikut serta dalam pemilu bulan Juni 1999. Selanjutnya pada 22 Februari kemudian PRD mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman untuk mengikuti pemilu. Walaupun dijegal oleh Bakin, namun akhirnya PRD dinyatakan lulus verifikasi secara yuridis untuk berpartisipasi dalam pemilu 1999 pada 24 februari.

Pada tanggal 5 Maret, Hendri Kuok kemudian dipilih PRD untuk duduk sebagai wakil PRD di dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diketahui oleh Rudini. Selanjutnya pada tanggal 12 Maret, KPU pun mengumumkan nomor peserta Pemilu 1999 kepada PRD, dan PRD mendapatkan nomor 16. Dengan demikian perjuangan parlementer pun teraktualisasi menjadi tahapan perjuangan PRD berikutnya.

Tahun 1999, PRD pun tampil dalam pemilu, suatu pemilu yang saat itu terdapat 48 Parpol sebagai kontestan. Saat itu akhirnya PRD hanya mendapat 78.000 suara. Meskipun begitu, angka tersebut merupakan hal yang cukup signifikan karena anggota PRD sendiri pada tahun 1999 paling banyak mencapai angka 1.000 orang. Pasca pemilu, kuantitas anggota PRD mengalami penurunan hingga menyisakan kurang lebih 500 orang. Anggota-anggota PRD tersebut tersebar di dalam 15 KPW (Komite Pimpinan Wilayah), 152 KPK (komite Pimpinan Kota) di seluruh Indonesia.³⁷

Meskipun akan mengenakan jubah parlementer dalam taktik perjuangan berikutnya, PRD tetap yakin bahwa tekanan gerakan massa dalam bentuk ekstra parlementer di jalanan akan lebih ampuh dalam membuka ruang demokrasi yang lebih luas lagi. PRD akan tetap akan bergabung dengan aksi-aksi massa untuk memboikot legislatif dan eksekutif yang tidak sanggup dan tidak mampu menjalankan tuntutan reformasi total yang programnya antara lain meliputi :³⁸

1. Program Politik dan Hukum antara lain; menuntut penangkapan dan pengadilan para jenderal pelanggar HAM, pengadilan Partai Golkar, penangkapan dan pengadilan koruptor pada masa Orde Baru hingga Reformasi, penyitaan dan nasionalisasi asset-aset koruptor untuk subsidi rakyat miskin, menolak RUU dan UU yang

³⁷ Miftahudin, *Radikalisasi Pemuda: PRD Melawan Tirani*, (Jakarta: Desantara, 2004), h. 88.

³⁸ Pernyataan sikap Komite Pimpinan Pusat PRD pada bulan Juli 2001. Ketua Umum: Haris Rusly Moti dan Sekjen: Natalia Scholastika.

anti Demokrasi, menarik militer dari Aceh dan Papua, dan pencabutan Dwifungsi ABRI.

2. Program Ekonomi antara lain; menuntut penghapusan hutang luar negeri, menuntut penurunan harga-harga kebutuhan pokok, naikan upah/gaji seratus persen, menolak kenaikan harga BBM, TDL, telpon, menolak privatisasi BUMN, menuntut lapangan pekerjaan bagi rakyat, menuntut pendidikan gratis dan demokratis, menuntut kesehatan gratis, menolak pengusuran rumah-rumah rakyat, dan menuntut Reformasi Agraria yang berorientasi pada kesejahteraan para petani.

Bagi PRD, perjuangan masih menuntut militansi yang tinggi untuk menggalang aksi-aksi massa. PRD akan selalu menyerukan pada rakyat bahwa kekuatan rakyat yang terorganisir mampu mencapai demokrasi sejati, bukan pada wakil-wakil rakyat di parlemen yang cenderung kompromistis dan oportunis. Partai-partai besar yang mewakili kaum demokrat harus mempunyai tanggung jawab politik menuntaskan perjuangan menciptakan demokrasi yang sejati.